

AKTUALISASI PERAN SOSPOL ABRI:

Perspektif Dwi Fungsi ABRI sebagai Konsepsi Politik Menghadapi Tantangan Pembangunan pada PJP II

Oleh: B. Suryawikarta

Pendahuluan

Pembangunan Jangka Panjang II 1998-2003 berada dalam kurun waktu persiapan menjelang berlaku efektifnya AFTA (ASEAN Free Trade Agreement). Keberhasilan mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dan keberhasilan memecahkan masalah yang timbul di berbagai bidang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan Hankam akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional untuk mampu mengelola dengan cara yang tepat era investasi dan perdagangan bebas dalam masa AFTA, APEC 2010 untuk lingkungan negara-negara maju dan APEC 2020 untuk lingkungan negara-negara yang sedang berkembang.

Bagaimana peran Sospol ABRI teraktualisasikan dalam era di mana tantangan global memunculkan berbagai *demands* (tuntutan-tuntutan), bukan saja yang ditimbulkan oleh terjadinya pergeseran dari masyarakat agraris ke industrialisasi bagi kebanyakan negara sedang berkembang, bersamaan dengan berlangsungnya era informasi pada akhir abad 20 dan dalam abad 21 itu?

Makalah ini mencoba secara singkat menjelaskan berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh berlakunya *"global market economy."* Kepedulian akan hal ini merupakan konsekuensi keterlibatan kita ke dalam AFTA dan APEC menjelang dan dalam kurun waktu abad 21. Dari situ akan diketahui bagaimana aktualisasi peran Sospol ABRI diwujudkan, sebagai dinamisor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga dalam era

yang penuh dengan persaingan itu, bangsa Indonesia tidak terkepinggirkan.

Tantangan Era Industrialisasi

Setelah berakhimya PJP I, Indonesia memasuki era industrialisasi. Sebagaimana yang dialami oleh negara-negara yang kini sudah maju, maka selama peralihan dari agraris ke industrialisasi terjadi berbagai pergeseran dan perubahan. Pergeseran dalam nilai-nilai sosial disebabkan *domestic environment* berinteraksi lebih intensif dengan *world environment*, dan berpengaruh kuat terhadap terjadinya perubahan struktur dan fungsi kelembagaan sosial, ekonomi, dan politik.

Intensitas interaksi antara kedua lingkungan komunitas itu dimungkinkan oleh kemajuan pesat yang dicapai peradaban umat manusia pada abad 20 di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia memasuki era industrialisasi di saat lingkungan global yang dibentuk oleh pengaruh negara-negara yang sudah maju sudah memasuki era informasi.

Dahulu ketika negara-negara yang sekarang ini disebut sebagai negara-negara maju (Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang) memasuki era industrialisasi, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Ohmae, 1995)¹:

- dikemudikan oleh pemerintahan negara-bangsa;
- berdasarkan kedaulatan bangsa yang merdeka;

- dikendalikan secara ketat oleh kekuatan-kekuatan yang terpusat;
- bersifat sensitif dalam masalah perbatasan;
- lebih menyukai modal domestik dan melindungi perusahaan-perusahaan domestik;
- bertujuan mewujudkan kesejahteraan negara yang bersangkutan melalui pengembangan unggulan ekspor dan industri manufaktur yang memacu pertumbuhan ekonomi;
- aktivitas/kegiatan/prakarsa pada pemerintah;
- pemerintah yang baik ialah yang menguatkan industri-industri prioritas; dan
- perubahan berlangsung secara berangsur-angsur.

Sekarang, di saat kita (Indonesia) memasuki era industrialisasi bersamaan dengan berlangsungnya era informasi, tidak bisa lagi sepenuhnya berpegang pada pola tersebut di atas. Era informasi, di mana kehidupan sosial, ekonomi dan politik, di mana:

- modal swasta dan informasi memegang kemudi;
- kedaulatan (sungguh-sungguh berada pada) warganegara;
- jaringan kerja yang bersifat otonom dari perusahaan-perusahaan swasta dan entitas-entitas regional yang satu-sama-lain saling memiliki ketergantungan;
- secara inheren (bersifat) tanpa garis perbatasan;
- masuknya modal asing dan perusahaan-perusahaan kelas dunia berikut para experts-nya disambut baik, mengakibatkan terciptanya pekerjaan-pekerjaan berkualitas tinggi;
- tujuan mewujudkan kesejahteraan regional atas dasar rasa saling memiliki ketergantungan, pemusatan jaringan kerja perusahaan-perusahaan yang menciptakan pelayanan informasi secara intensif untuk menguasai nilai yang berasal dari para pelanggan;
- inisiatif-inisiatif kewirausahaan (berpeluang untuk berkembang);
- pemerintahan yang baik ialah yang menumbuhkan kesinambungan pembangunan regional yang tidak berfokus pada industri yang spesifik;

- perubahan-perubahan terjadi tiba-tiba dalam bulanan ke tahunan. (Ohmae, 1995).

Negara atau bagian negara yang menyiapkan diri menghadapi era informasi yang kini menggerakkan ekonomi pasar dunia ialah Hong Kong/Shenzhen, Singapore termasuk Johore dan Batam, Taiwan/Fujian, Southern China (Pearl River Delta), Southern India (e.g. Bangalore), North Mexico/Southwestern U.S.A., Silicon Valley, New Zealand, Lombardia, Pacific Northwest of the United States.

Batam adalah representasi hubungan segitiga SIJORI (Singapura-Johor-Riau) yang merupakan model "kawasan" di mana hubungan saling ketergantungan berbagai perusahaan kelas dunia menciptakan layanan informasi yang intensif untuk menguasai nilai yang berasal dari para pelanggan. Nilai yang dimaksud di sini ialah perubahan perilaku pasar yang terbentuk karena berubahnya perilaku konsumen, perubahan mana bisa terjadi secara tiba-tiba dalam bulanan ke tahunan. Hal itu hanya bisa dipantau lewat pemusatan jaringan kerja perusahaan-perusahaan, seperti yang dimodelkan dalam hubungan SIJORI. Bagaimana dengan Jakarta atau Surabaya atau Ujungpandang?

Era industrialisasi yang kini dijalani oleh Indonesia berlangsung bersamaan dengan era informasi, sehingga mengharuskan adanya kombinasi pola penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara yang berlaku pada era industrialisasi dan yang dituntut oleh era informasi. Misalnya, aktivitas/kegiatan/prakarsa tidak lagi terpusat pada pemerintah tetapi juga tidak boleh sepenuhnya berada pada wirausahawan (*entrepreneurial initiatives*), jadi harus berimbang. Menentukan imbalan ini harus dirancang model yang dinilai tepat berdasarkan ketajaman analisis pasar global. Apakah para analis itu berasal dari ABRI atau pakar atau pakar yang ABRJ? Itu samasekali bukan masalah substansial, karena yang sebenarnya dituntut adalah ketajamannya, dus kemampuan intelektualnya dalam mengolah informasi yang mengalir deras dan cepat berubah.

Apabila kita berada dalam proses memasuki industrialisasi maka bisa dibuat matrix

untuk mengukur kemajuan yang dicapai, yaitu matrix antara tahapan perkembangan industrialisasi dengan persyaratan pasar. Industrialisasi disebut berkembang maju jika semua atau sebagian besar perusahaan sudah berada pada tahapan *innovative company*. Pada tahap ini *research & development* bisa dilakukan oleh negara lain atas permintaan sesuatu negara, sementara *design* (rancang-bangun) dikerjakan oleh negara yang diminta oleh negara yang melakukan riset. Pembelian bahan dilakukan oleh negara yang berbeda dengan yang mengerjakan proses manufaktur. Pemasaran dikerjakan oleh negara yang memang mengenal nilai yang berasal dari para pelanggan. Dalam proses terjadinya penjualan ada negara tertentu yang lebih piawai menangannya, demikian selanjutnya dalam proses penyebaran dan pelayanan.

Tetapi tahap *innovative company* ini dicapai setelah berhasil melampaui tahap *flexible company*. Tahap *flexible company* bisa dicapai setelah sukses melewati tahap *quality company*, dan tahap ini hanya bisa dicapai setelah lolos dari tahap paling awal yaitu *efficient company*. Semua tahapan itu adalah refleksi dari persyaratan pasar (dalam hal ini pasar global).

Industri kita masih bergulat di tingkat paling awal yaitu berupaya mempertinggi efisiensi agar berdaya saing tinggi. Itulah sebabnya *high cost economy* kerap kali dikeluhkan dan menjadi kepedulian utama pemerintah dalam setiap terbitnya kebijakan berupa deregulasi, debirokratisasi sejak tahun 1983. Jadi apabila sulit lolos dari tahap efisiensi ini, maka akan sulit memasuki tahap peningkatan kualitas, tahap fleksibilitas usaha, menuju tahap usaha yang inovatif. Jelas di sini keterkaitan inisiatif pemerintah dalam menentukan apakah usaha dibiarkan berjalan tidak efisien atau didorong untuk efisien?

Jika di sini banyak diungkap dunia usaha, tidak berarti kasus yang sama bukan merupakan tantangan birokrasi pemerintah. Dalam pola penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada era industrialisasi (seperti diuraikan di atas) inisiatif pemerintah – dus juga birokrasinya, termasuk ABRI – cukup besar pengaruhnya

terhadap kemajuan dunia usaha. Dalam hubungan ini, *steering rather than rowing*² perlu dilakukan oleh pemerintah, sebab terus-menerus mendayung (*rowing*) berarti memikul beban terlalu berat. *Steering* (mengarahkan) berarti menumbuhkan inisiatif, dus memberdayakan masyarakat termasuk dunia usaha terutama industri kecil yang jumlahnya ribuan di Indonesia ini.

Trend dan Tantangan Global

Perubahan sosial yang berlangsung sekarang ini begitu cepat, juga jangkauan pengaruh perubahan itu meluas. Perubahan dalam bidang teknologi transportasi dan komunikasi telah menciptakan dunia di mana segala sesuatu bisa di mana saja dan dijual ke mana saja di seluruh muka bumi ini. Ekonomi nasional mulai memudar, sedangkan ekonomi regional mekar sejalan dengan lebih menguatnya saling keterkaitan ekonomi global. Komunikasi yang langsung dan transportasi yang cepat berarti menjadikan pasar lebih efektif dalam melayani mulai dari titik produksi hingga distribusi ke seluruh penjuru dunia.

Dalam pada itu, keterampilan meneliti dan rancang-bangun dari mana pun bisa dimasukkan lewat jaringan elektronik walau harus membayar mahal untuk itu. Dalam era di mana kompetisi begitu ketat, maka tiap negara mesti menginvestasikan dana yang lebih besar di bidang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan infrastruktur. Bagi Indonesia, kiranya perlu ditilik lebih jauh mengenai jumlah dan mutu keahlian tenaga peneliti dan pengembangan yang mampu menganalisis perkembangan teknologi masa depan berikut keahlian yang dituntutnya.

Keorganisasian yang berkemampuan melakukan interaksi global lewat jaringan kerja dan keahlian, harus disiapkan supaya bisa memenuhi tuntutan kerjasama dunia dalam hal tenaga ahli di berbagai bidang. Organisasi yang ramping dan lincah yang jadi model tahun 1990-an dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Begitu yang diberlakukan dalam dunia usaha, yang juga diterapkan dalam birokrasi negara. Tumbuhnya blok-blok ekonomi regional adalah refleksi dari persiapan memasuki ekonomi

global, sebab di situ kesepakatan-kesepakatan bersama dibuat sehingga bisa melahirkan efek lebih besar (*synergy*) terhadap ekonomi global.

Kesepakatan di bidang perdagangan di antara sesama anggota blok-blok ekonomi regional dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan-hambatan baik tarif maupun non-tarif. Walaupun, seperti umumnya blok, kerap kali menimbulkan efek kontradiktif (Thurow, 1996)³, karena dalam dunia blok-blok perdagangan regional menjual produk sesuatu negara di mana negara tersebut bukan anggota dari kelompok perdagangan itu akan semakin menjadi sulit, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang.

Selain itu, pertimbangan-pertimbangan politis dan budaya juga merupakan aspek penting dalam globalisasi, karena globalisasi melibatkan proses-proses hubungan internasional dan menerbitkan budaya dan kesadaran global. Waters (1995) menyatakan bahwa globalisasi melibatkan hubungan-hubungan secara sistematis semua individu dan ikatan-ikatan sosial yang terbentuk di planet bumi ini.⁴

Trend atau kecenderungan global yang diuraikan di atas akan meluncur lebih cepat, dan menimbulkan berbagai kecenderungan baru sejalan dengan kecepatan perkembangannya. Semua itu, menerbitkan sejumlah tuntutan-tuntutan (*demands*), persyaratan (*requirement*), dan kecepatan (*rapidness*) untuk memenuinya.

Tuntutan yang bersifat mendesak bisa dianggap sebagai tantangan, terutama untuk bisa mewujudkannya dalam situasi di mana masih adanya keterikatan. Tantangan itu antara lain: (1) Munculnya tuntutan publik akan *transparency and accountability of public bureaucracy* (Haque, 1994)⁵. Tanpa terwujudkannya keterbukaan dan rasa tanggung-gugat itu, maka birokrasi negara akan kehilangan ciri publiknya dan kehilangan legitimasi publiknya. (2) *The ethical attitudes for public administrators should include an equity ethic* (Frederickson, 1971)⁶. Sikap etis para administrator publik termasuk etika dalam mewujudkan pemerataan adalah tuntutan yang sudah

lama digelar oleh publik. Semakin melebarnya kesenjangan jika tidak bisa diatasi, akan merupakan bibit pertentangan dan timbulnya keresahan sosial, ketidakpastian hukum, dan putus asa. (3) Sikap tanggap birokrasi negara karena globalisasi menumbuhkan keadaan yang bersifat kompetitif (penuh persaingan). Bila birokrasi negara tidak bersikap tanggap terhadap perubahan-perubahan cepat yang terjadi (misalnya, karena profesionalitasnya rendah, juga integritas/wibawanya lemah) maka masalah yang ditimbulkan oleh perubahan yang cepat itu akan menjadi lebih kompleks dan sukar dipecahkan. (4) Dalam era globalisasi, timbulnya partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat bisa dipandang sebagai konsekuensi dari komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Keterlibatan setiap warga negara adalah sesuatu kondisi *sine qua non* bagi bekerjanya sistem demokrasi (Golembiewsky, et al., 1976)⁷. Pembuatan keputusan yang demokratis pada hakekatnya mensyaratkan bahwa mereka yang terkena akibat sesuatu kebijakan mestinya diberi peluang untuk proses pembuatannya, jika tidak maka berarti melaksanakannya dengan pengaruh yang lain. Partisipasi yang terdesentralisasikan, bisa mendorong sejumlah pencapaian tujuan secara demokratis. Hal ini tidak berarti hanya menawarkan suatu wahana politik dan modal bagi pemberdayaan kepada mereka yang berada di sektor-sektor marginal dari dan di dalam masyarakat, tetapi juga bisa – di dalam suatu keadaan yang benar – memajukan pengetahuan dan informasi mengenai hal ikhwal politik, meningkatkan kepercayaan politik dan kemampuan mengontrol yang bisa meniadakan proses alinasi (Stenberg, 1972; Smith, 1971; and Cole, 1974)⁸.

Salah satu cara untuk menjamin adanya partisipasi ialah melalui desentralisasi, karena desentralisasi dapat mendorong keterlibatan penduduk (setempat) untuk berpartisipasi dalam menghasilkan barang dan jasa, menyelenggarakan pengiriman bagi atau ke daerah atau lokasi yang spesifik. Desentralisasi juga adalah strategi untuk membuat semua pekerjaan berjalan cepat, komunikasi singkat,

prosedur tidak berbelit, dan pembuatan keputusan jauh lebih cepat.

Cara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ialah melalui koperasi dan kemitraan. Metode yang paling efektif berurusan dengan masalah yang kompleks dan secara potensial sulit untuk berubah ialah melalui keterlibatan semua partisipan (Jackson and Frigon, 1994)⁹.

Keterkaitan bangsa-bangsa dalam "perkembangan global" juga mengharuskan pengkajian-ulang hubungan-hubungan internasional di antara negara dengan negara dan antara banyak negara. Semua negara di dunia menghendaki saling ketergantungan yang menguntungkan dan hubungan dalam pola yang berbeda satu sama lain. Kepustakaan sekarang mengenai masa depan hubungan internasional menunjukkan bahwa dunia akan bersifat dualistis. Ada integrasi pada level daerah tapi tetap terorganisasikan sebagai negara-negara bangsa. Dinamika perubahan telah menyebabkan tumbuhnya himpunan-himpunan dan organisasi-organisasi baru ke dalam medan politis, dan semua upaya berbagai entitas baru ini diarahkan untuk mendapatkan sumber-sumber eksternal sehingga memperluas dan mengintensifkan dinamika masalah-masalah dunia. Hubungan-hubungan lintas bangsa, perdagangan-perdagangan dan investasi internasional, manajemen bantuan dan pinjaman luar negeri, dan sebagainya semua itu merupakan unsur-unsur yang akan membentuk format dan pola-pola baru. Tantangan bagi pembangunan administrasi internasional yang baru menjadi semakin jelas.

Gagasan mengenai masyarakat global menjadi begitu penting karena berbagai kejadian: (1) munculnya industri komunikasi global, (2) pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional, (3) meningkatnya persaingan pasar internasional, (4) pengaruh pasar modal global, (5) gerakan internasional mengenai HAM, (6) pergeseran yang signifikan dari sistem peranan dan intervensi pemerintah ke sistem pasar. Dalam kondisi yang begini, Indonesia justru masih bergulat dengan banyak urusan yang belum terselesaikan seperti masalah kemiskinan, pemerataan, fasilitas umum dan sosial yang tidak memadai, yang semuanya itu

memerlukan penanganan dengan menempatkannya sebagai prioritas utama.

Bagaimana Aktualisasi Peran Sospol ABRI diwujudkan?

Pertanyaan ini sulit dijawab, karena sangat spesifik Indonesia. Tetapi dalam konteks peran sospol, sebenarnya ABRI sebagai kekuatan penggerak (dinamisator) sudah dipedomani oleh Doktrin Catur Dharma Eka Karma 1988 yang menyatakan:

"Bersama-sama dengan organisasi sosial-politik lainnya mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan, serta mendorong setiap upaya meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dalam rangka memantapkan ketahanan nasional guna mewujudkan tujuan nasional". (Maulani, 1996)¹⁰.

Dikaitkan dengan trend dan tantangan global pada saat kita (Indonesia) memasuki era industrialisasi di mana dunia sudah dilanda era informasi, maka peran sospol ABRI harus bisa diaktualisasikan lewat banyak hal, seperti:

1. Dengan keorganisasiannya yang ramping dan modern, ABRI bisa bergerak lebih lincah karena tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi, terutama yang dapat mengancam HANKAMNEG.
2. Dengan penguasaannya terhadap teknologi moderen, ABRI dapat melakukan berbagai inovasi industri baik dalam produk alat-alat berat maupun industri manufaktur lainnya lewat bantuan atau kemitraan dengan sektor swasta nasional.
3. ABRI yang telah lebih dahulu memahami penggunaan alat-alat komunikasi mutakhir, bisa mengembangkannya bagi keperluan sipil dan pembangunan nasional dengan melakukan berbagai modifikasi.
4. ABRI yang memiliki Doktrin Dasar (TAHANAS, HANKAMNEG, Wawasan Nusantara) dan Doktrin Induk (Kematraan masing-masing Angkatan dan Polri) merupakan kekuatan utuh bangsa yang bisa menjamin integritas nasional dari terpaan negatif informasi global.
5. ABRI yang akar utamanya adalah rakyat merupakan kekuatan yang kondusif bagi

proses demokratisasi, transparansi, perlindungan HAM, dan penegakan hukum sehingga bisa bertindak pro-aktif terhadap setiap tuntutan global.

6. Profesionalitas ABRI sudah terbentuk sejak di bangku pendidikan, sehingga dengan lancar bisa mengembangkannya guna memenuhi tuntutan dan persyaratan persaingan global.
7. Sebagai dinamisator, maka ABRI bisa mendorong semua kekuatan nasional untuk turut ambil bagian dalam setiap proses pembuatan keputusan di semua tingkatan yang bertujuan merespon tuntutan global dan akan berakibat kepada hari depan bangsa Indonesia.

Kepeloporan ABRI, di situlah sumber bagi aktualisasi peran sospol ABRI yang akan merambah kepada terwujudnya ketahanan nasional yang sangat diperlukan dalam menghadapi hantaman global. Satu syarat saja yang mesti dipegang teguh, supaya peran sospol ABRI tetap aktual dalam situasi macam apa pun, yaitu ABRI harus tetap menyatu dengan rakyat. Sejarah kelahiran republik ini telah membuktikan itu, demikian juga dalam era mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu melalui pembangunan. Model pendekatan bisa bervariasi, tetapi "tidak pernah ada ikan bisa hidup tanpa air."

Sumber Acuan

1. Ohmae, Kenichi. 1995. *The End Of The Nation State: The Rise of Regional Economies. How new engines of prosperity are reshaping global markets.* Hammersmith, London: Harper Collins Publishers.

2. Osborne, David and Ted Gaebler. 1993. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: A Plume Book.
 3. Thurow, Lester C. 1996. *The Future of Capitalism*. New York: William Morrow and Co.
 4. Waters, Malcolm. 1995. *Globalization*. London: Routledge.
 5. Haque, M. Shamsul. 1994. "The Emerging Challenges to Bureaucratic Accountability: A Critical Perspective," in Ali Farazmand (ed) *Handbook of Bureaucracy*. New York: Marcel Dekker Inc.
 6. Frederickson, George H. 1971. "Creating Tomorrow's Public Administration," *Public Management*, 51:1-13, November 1971.
 7. Golembiewsky, Robert T., Frank Gibson, and Geoffrey Y. Cornog. 1976. *Public Administration*. Chicago, 111: Rand McNally.
 8. Stenberg, C. 1972. "Citizens and the Administrative State: From Participation to Power." *Public Administration Review*, 32:190-97.
 - Smith, M. 1971. "Alienation and Bureaucracy: The Role of Participatory Administration." *Public Administration Review*, 31:6586-64.
 - Cole, R. 1974. *Citizen Participation and the Urban Policy Process*. Lexington, MA.: Heath.
 9. Jackson, Harry K., and Norman L. Frigon. 1994. *Managing 2000: The Practical Guide to World Class Competition*. New York: Van Nostrand Reinhold.
 10. Maulani, Z.A. 1996. *Implementasi Fungsi Sospol ABRI pada Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*. Makalah dipresentasikan dalam Diskusi Panel Forum Kajian Dwi Fungsi ABRI di Seskoad, Bandung 4 s/d 6 November 1996.
- B. Suryawikarta, MPA., Ph.D adalah Dosen FISIP-UNPAD, Dosen Pascasarjana ITB program Studi Pembangunan, Dosen Pascasarjana UNPAD-LAN Program Studi Ilmu-ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Kebijakan Publik dan Dosen SESPIM POLRI.